

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bab ini merupakan penutup kajian pada skripsi yang akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian tentang Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Semarang, serta saran terhadap keberlanjutan pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang. Maka dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini diperuntukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berada di kawasan kota lama. Peralihan fungsi kawasan kota lama menjadikan masalah yang harus segera diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama. Program Revitalisasi merupakan implementasi dari peraturan daerah tersebut dan dijadikan sebagai sebuah upaya untuk memvitalize kembali fungsi kawasan kota lama semarang dan menerapkan fungsi baru yang modern sehingga dapat mengubah citra kawasan dan berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya.

2. Pemerintah kota Semarang telah melakukan berbagai upaya, dalam pelaksanaannya program revitalisasi kawasan kota lama Semarang terbagi atas 3 tahapan, yang pertama adalah tahap Perlindungan, Kota Lama sebagai kawasan bersejarah dengan bangunan-bangunan kuno harus mendapat perlindungan secara payung hukum dan perlindungan fisik, yang kedua tahap pelestarian atau pengembangan dalam tahapan ini Ada 105 daftar bangunan yang diidentifikasi dan akan di konservasi untuk dan yang terakhir ketiga adalah pemanfaatan, jadi setelah kawasan Kota Lama dan bangunan-bangunannya berhasil dilestarikan, maka tahap akhir dari sistem pengelolaannya adalah pemanfaatannya. Akan sia-sia jika kawasan Kota Lama dilestarikan namun tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama saat ini sudah cukup baik namun belum semuanya optimal masih dalam proses pengembangan menuju Kawasan Kota Lama sebagai Tujuan Pariwisata 2020. Masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan tahapan Revitalisasi dikarenakan dalam implementasi kebijakan juga terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi dalam hal ini adalah :
 - a) Standar dan sasaran dari kebijakan. Adanya standar dan sasaran yang jelas yang mengatur tahapan-tahapan Revitalisasi Kawasan Kota Lama melalui Buku Grand Design Kota Lama

Semarang, sehingga dengan adanya tujuan standar sasaran yang jelas masing-masing agen pelaksana memahami kebijakan dengan mudah sehingga tidak terjadi multiintrepetasi.

- b) Hal-hal terkait sumberdaya baik SDM maupun sumberdaya yang lain berkaitan dengan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama dapat teratasi dalam jangka waktu tertentu telah ditetapkan target capaian dalam implementasi kebijakan. Selama tahun 2016 sendiri sudah cukup baik terutama dari segi anggaran. Namun Secara segi fasilitas penunjang Pemerintah Kota Semarang masih kurang terlihat BPK2L sebagai lembaga pengelola masih belum memiliki kejelasan terkait kantornya. Akan tetapi disadari betul yang menjadi hambatan dalam upaya kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama adalah sumberdaya manusia terutama sering terjadi pergantian kepengurusan pada BPK2L. Dengan adanya kepengurusan baru di dalam BPK2L ini mulai memberikan dampak daripada sebelumnya apalagi ada faktor wakil walikota yang terlibat dalam struktural BPK2L. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup positif bagi seluruh OPD dalam melakukan tugasnya.
- c) Hubungan antar Organisasi Dalam pelaksanaannya komunikasi antar organisasi BPK2L sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk mengelola kawasan kota lama sudah

melakukan komunikasi ke beberapa OPD, masyarakat, dan pihak swasta untuk mewujudkan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama. Bahkan di setiap OPD sudah memiliki Perannya masing masing sehingga untuk mewujudkan Revitalisasi Kawasan Kota Lama ini tidak lagi hanya bergantung pada satu OPD saja melainkan tahu perannya masing –masing. Hubungan dengan pihak swasta juga telah diatur melalui SOP (Standart Operasional Prosedure) yang dimiliki oleh BPK2L, SOP ini dibuat sebagai aturan dalam proses perijinan antara pemerintah dengan swasta/Investor serta penandatanganan MoU bagi para pelaku dunia usaha. Hubungan yang terjalin antar tiap OPD sudah terjalin Cukup Baik dan untuk pihak swasta telah diatur melalui SOP tersendiri.

- d) Karakteristik Agen Pelaksana Terkait struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu memengaruhi implementasi suatu program, sudah dibentuk sejak awal pembentukan BPK2L dan sudah ada pula pembagian Program antar OPD namun sering terjadinya pergantian anggota BPK2L sebagai lembaga khusus yang berwenang dalam mengelola kawasan kota lama yang disebabkan oleh berbagai faktor mengakibatkan kepengurusan sekarang oleh yang baru ini memulai lagi dari awal dalam

melakukan pengelolaan tentang kota lama semarang, hal ini memperlambat langkah gerak BK2L.

- e) Kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi di kawasan kota lama sangat kompleks akibat tidak terfungsikannya kawasan kota lama menimbulkan permasalahan yang pengangannya membutuhkan keseriusan setiap agen pelaksana kebijakan.
- f) Disposisi terhadap para implementor kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Pemerintah Kota khususnya melalui BPK2L dan OPD lain sudah berupaya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas dan kepada pihak swasta atau investor. Melalui sosialisasi diharapkan kebijakan Revitalisasi ini lebih dapat dimengerti dan dirasakan oleh masyarakat dan juga harus diiringi oleh adanya timbal balik dari masyarakat.

4.2 Saran

Berikut adalah saran-rekomendasi terkait dengan persoalan yang terdapat di dalam pelaksanaan kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang.

Bagi Instansi

1. Keberadaan BPK2L yang kurang berdampak sehingga Sering mengakibatkan terjadinya pergantian sumberdaya manusia atau anggota BPK2L maka perlu dilakukan Penguatan sistem kelembagaan pengelolaan.
2. Perlu adanya Fasilitas penunjang Seperti Kantor. BPK2L sebagai lembaga pengelola BPK2L masih belum memiliki kejelasan terkait keberadaan kantornya.
3. Perlu adanya persamaan persepsi melalui sosialisasi, pelatihan, komunikasi dan koordinasi terus yang diupayakan oleh Pemerintah Kota terutama kepada beberapa OPD. Sehingga tidak timbul anggapan bahwa kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama milik dari BPK2L saja tapi menjadi kebutuhan bersama. Sehingga dapat memunculkan sikap inovatif dan kreatif dari perangkat di tiap-tiap OPD.
4. Mengajak para pemilik bangunan atau gedung di kota lama atau melibatkan para pelaku usaha untuk melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan Renovasi Bangunan. Dunia usaha ikut berperan dalam kaitannya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan dengan menerapkan fungsi baru dalam kawasan.

5. Perlu digencarkan kembali sosialisasi dari adanya kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang melalui kegiatan-kegiatan atau event-event sebagai stimulan bagi seluruh unsure terutama kepada masyarakat, harapanya kebijakan Revitalisasi ini lebih dapat dimengerti dan dirasakan oleh masyarakat dan juga harus diiringi oleh adanya timbal balik partisipasi dari masyarakat.

Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk penelitian selanjutnya tentang Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Tidak hanya dari sisi teknis saja melainkan dari sisi sosial, lingkungan dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang.